

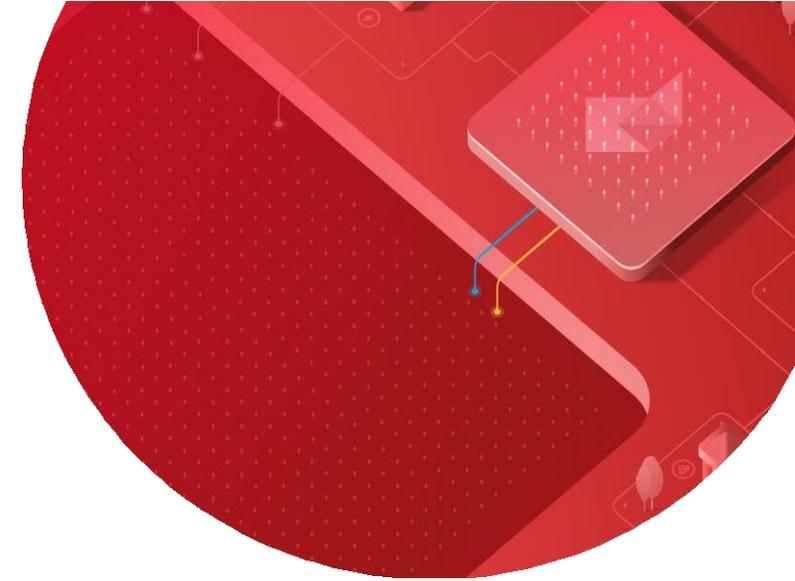
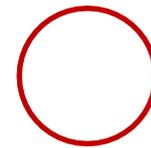
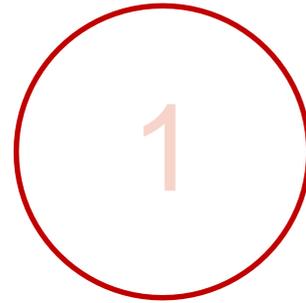
Arah Kebijakan Pelaksanaan Satu Data Indonesia

Oktorialdi, Ph. D.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan selaku
Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat,
Kementerian PPN/Bappenas

Kamis, 21 Juli 2022
Forum Satu Data Tingkat Kota Surabaya

Pengantar Kebijakan Satu Data Indonesia





GOTONG ROYONG DATA MENCAPAI INDONESIA EMAS 2045

Indonesia Emas 2045

Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur

Mendukung Visi

Transformasi Digital Nasional

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (SPBE)

Data Pemerintah Berkualitas dan Terintegrasi (SDI)

Kebijakan SPBE dan SDI berjalan beriringan dan saling mendukung

Mewujudkan

Birokrasi Efisien dan Akuntabel

Layanan Pemerintah Berkualitas dan Mudah Diakses

Pembangunan Nasional Adaptif dan Tepat Sasaran

Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, SDGs, dan Perlindungan Sosial

Urgensi Satu Data Indonesia

Kondisi *Existing* Penyelenggaraan Data Pemerintah

- **Keberagaman** data dan metodologi pendataan yang belum berstandar
- **Duplikasi dan minimnya keterpaduan** data pemerintah
- **Kekurangan SDM talenta digital** dan **efektivitas anggaran data** di Instansi Pemerintah
- **Egosektoral** dalam penyelenggaraan data dan platform data, serta **keengganan berbagipakai data** antar Instansi Pemerintah

Penyatuan
Tata Kelola
dalam Satu
Data Indonesia

Tujuan Kebijakan Satu Data (Perpres 39/2019)

Mewujudkan **ketersediaan data** yang **akurat**, **mutakhir**, **terpadu**, **dapat dipertanggungjawabkan**, **mudah diakses**, dan **dibagipakaikan** antar Instansi Pemerintah untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan



Transformasi Digital Pemerintahan

Kebijakan Nasional

5 Arahan Presiden Terkait Perencanaan Transformasi Digital



- 1** Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital yang diikuti percepatan penyediaan layanan internet di **12.500 desa** atau kelurahan dan titik-titik layanan publik.
- 2** **Roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis** seperti: pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran
- 3** Percepatan **integrasi pusat data nasional**
- 4** Mempersiapkan kebutuhan **SDM (sumber daya manusia) talenta digital**
- 5** Mempersiapkan dengan cepat **regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital**



“Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita”

Sumber: Pidato kenegaraan di DPR (16 Agustus 2019)

Gambaran Umum Satu Data Indonesia

Prinsip, Regulasi, Kelembagaan, Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Data



Prinsip Satu Data Indonesia

PRINSIP SATU DATA

Satu Standar Data

Satu Metadata Baku

Interoperabilitas

Kode Referensi/Data Induk

ELEMEN PENDUKUNG

Kelembagaan

Regulasi

Penganggaran

SDM

Data Prioritas
(Fundamental Dataset)

Rencana Aksi

Teknologi

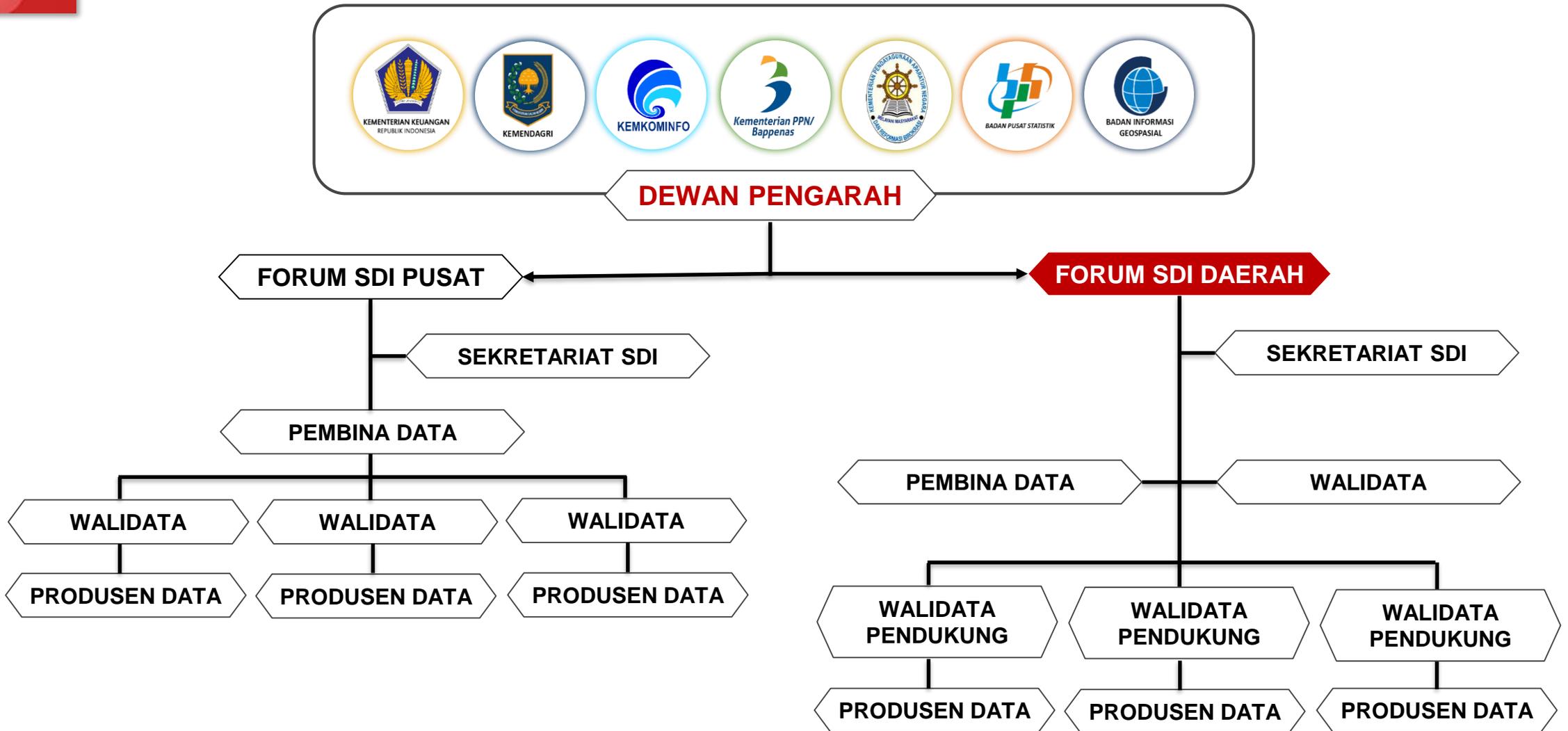
Pemberdayaan



SATU DATA
INDONESIA



Penyelenggara Satu Data Indonesia



Tujuan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia

Forum SDI melaksanakan tugas melalui kegiatan

Komunikasi



Penentuan Daftar Data

- Sesuai arsitektur SPBE
- Kesepakatan Forum SDI Pusat
- Arahan Pembina Data

Koordinasi



Penentuan Data Prioritas

- RKP & RPJMN
- SDGs
- Mendesak/ arahan Preside

Kesepakatan



Penentuan Rencana Aksi

- Pengembangan SDM
- Penyusunan Juknis pelaksanaan SDI
- Kegiatan Pengumpulan Data
- Kegiatan Pemeriksaan Data
- Kegiatan Penyebarluasan Data
- Kegiatan lain yang mendukung tercapainya data sesuai prinsip SDI

Penentuan Kode Referensi dan /atau Data Induk

Penentuan Calon Pembina data lainnya

Pembatasan Akses Data Tertentu

Forum Satu Data Indonesia berperan dalam Penyelesaian Permasalahan tata Kelola Data yang terjadi di Indonesia

Perbaikan Tata Kelola Satu Data Indonesia

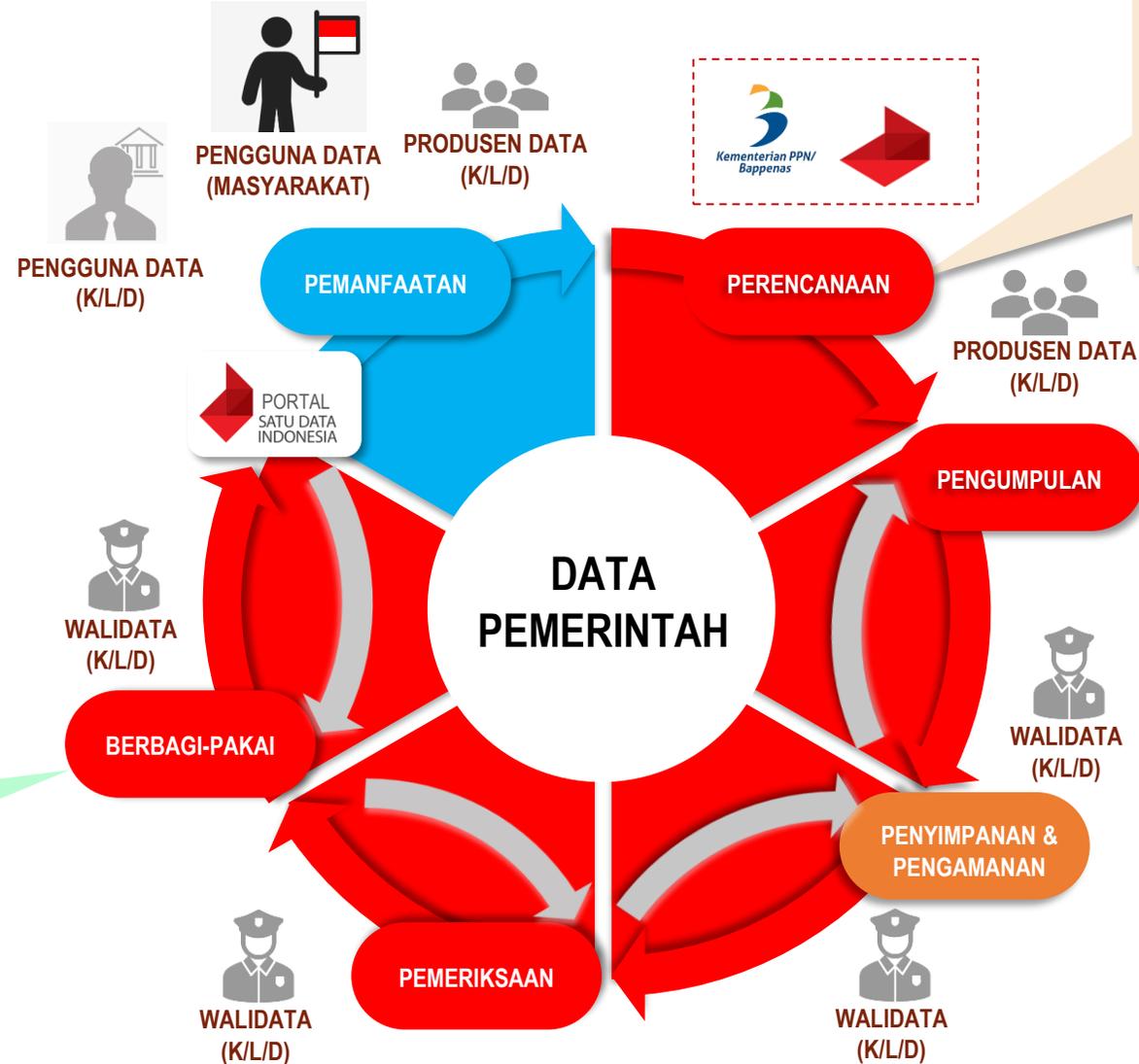
Integrasi Siklus Pembangunan dengan Siklus Data Pemerintah

Lingkup

- Daftar Data
- Daftar Data Prioritas
- Rencana Strategis
- Rencana Aksi
- Rencana Penganggaran
- Arsitektur Data
- Standar Data
- Metadata baku
- Peraturan Menteri tentang Data Prioritas

Data-driven Policy-Making

Big Data Analytics 	Modeling
Artificial Intel 	Viz/Dashboard

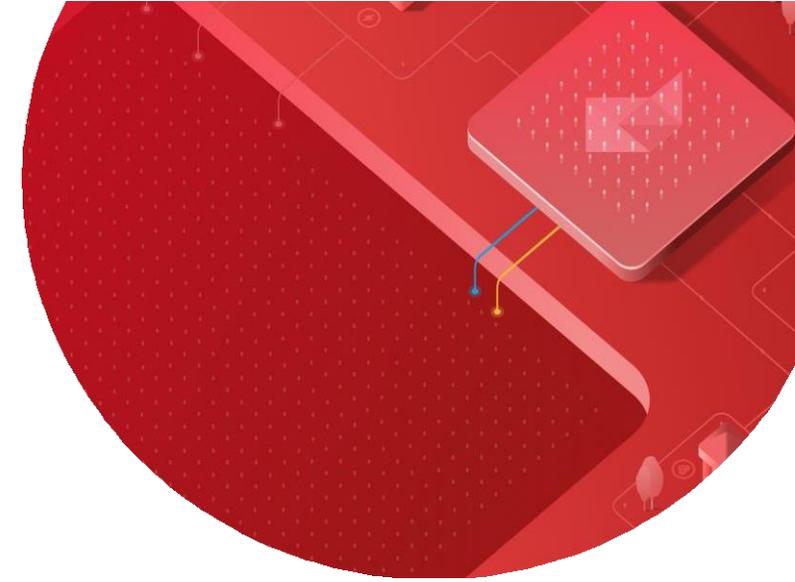


PRINSIP SATU DATA

Standar Data 	Kode Referensi
Metadata 	Interoperabilitas

Perkembangan Satu Data Indonesia

2



Pencapaian Kebijakan Satu Data Indonesia

2021

- **Pembentukan Pokja Forum SDI** melalui Kepmen PPN
- Penyelesaian **tema data Prioritas** & Identifikasi Ketersediaan Data dan informasi
- **Rapat Dewan Pengarah 2021: Percepatan SDI**
- Asesmen massal SDI untuk K/L & Provinsi
- Pengembangan **Platform Portal SDI**
- **Standar Data & Metadata:**
 - Perban BPS 4/2021 (Standar Data Statistik Nasional)
 - SE Kepala BIG 6/2021 (Pedoman Standar Data & Metadata Spasial)
 - Pedoman Keuangan yang mengacu pada IFMIS

2019

- **Inisiasi Regulasi Kelembagaan & Tata Kerja Dewan Pengarah dan Forum**
- Sosialisasi dan Asistensi awal K/L

2020

- **Penerbitan Regulasi:**
 - Permen PPN 16/2020 (Manajemen Data SPBE)
 - Permen PPN 17/2020 (Pengelolaan Portal SDI)
 - Permen PPN 18/2020 (Tata Kerja Penyelenggara SDI)
- **Standar Data & Metadata:**
 - Perban BPS 4/2020 (Juknis Standar Data Statistik)
 - Perban BPS 5/2020 (Juknis Metadata Statistik)
 - Pedoman Keuangan yang mengacu pada IFMIS
- **Rapat Dewan Pengarah 2020: Penyiapan Fondasi Kebijakan**

Target 2022

- Pengembangan lanjut Portal SDI (dilanjutkan *grand launching* Nov 2022)

Januari - Juli 2022

- **Soft Launching Portal SDI**
- Penyelesaian **Data Prioritas tahun 2022**
- Penyelesaian **Renaksi SDI tahun 2022-2024**
- Rapat Dewan Pengarah 2022: **"Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia 2022"**

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA (1/3)

Sosialisasi, Regulasi dan Kelembagaan



- **491 Sosialisasi** dan **Asistensi** dari Januari 2021 hingga Mei 2022
- Pembentukan **regulasi** dan **kelembagaan** SDI tingkat Pusat dan Daerah
 - **Pusat:**
 - **15 K/L** dalam tahap **pengundangan** dan/atau **telah terbit**;
 - **2 K/L** dalam tahap **harmonisasi**;
 - **67 K/L** dalam tahap **penyusunan** regulasi SDI sesuai dengan Perpres 39/2019
 - **Daerah:**
 - 16 Provinsi** dan **105 Kab/Kota** telah menerbitkan regulasi SDI sesuai dengan Perpres 39/2019

Pembentukan Kelembagaan Pusat



- Pembentukan **Pokja Forum SDI Tingkat Pusat** melalui penerbitan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembentukan **Gugus Tugas SDI Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah dan Subsidi** melalui penerbitan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembentukan **Gugus Tugas Pengembangan Sistem Basis Data Tunggal Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah** melalui penerbitan SK Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Pembentukan **Gugus Tugas SDI Transformasi Registrasi Sosial Ekonomi** melalui penerbitan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas (*dalam proses*)
- Prakarsa pembentukan **Gugus Tugas Satu Data Statistik Kriminal Indonesia (SDSKI)** yang diinisiasi oleh Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko Polhukam, dan Kementerian Hukum dan HAM (*dalam proses inisiasi*)

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA (2/3)

Landasan Standar dan Metadata



Data Statistik

- Peraturan BPS Nomor 4 tahun 2021 tentang **Standar Data Statistik Nasional**

Data Spasial

- SE Kepala BIG No.6/2021 tentang **Pedoman Standar Data dan Struktur - Format Baku Metadata Spasial**

Data Keuangan Negara

- **Pedoman** standar data dan metadata keuangan melekat pada pedoman-pedoman pengoperasian aplikasi **keuangan** dengan mengacu pada IFMIS (*Integrated Financial Management Information System*).

Kode Referensi dan Data Induk

Referensi Penduduk

- NIK sebagai referensi tunggal penduduk Indonesia sesuai dengan UU No 23 tahun 2006 diperkuat dengan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia 2021 dan arahan Dewan Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah 2021

Referensi Kewilayahan

- Pemadanan antar Kode Wilayah Administrasi (Kode Wilkerstat BPS, Kode Wilayah Administrasi Kemendagri, Kode Pos) dalam sig.bps.go.id

Referensi Fasyankes

- Pemaduan Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan antara Kemenkes dan BPJS Kesehatan

Referensi Ketenagakerjaan

- Sedang berlangsung Pemaduan Tata Kelola Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) antara BPS dan Kemenaker

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA (3/3)

Interoperabilitas dan Portal Satu Data



- **Pengembangan Portal SDI 2022** meliputi *Modul Manajemen User dan Akses, Dashboard Monitoring, Repository, Open Data*, dan Layanan SDI (Forum Data, Bimbingan Teknis & Permintaan Data)
- **Pemanfaatan server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)** dan uji penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)
- **Integrasi Portal SDI** dengan **Geoportal JIGN**
- **Progres terintegrasi:**

Instansi Pusat

Terhubung

25 dari **84** → **30%**

Jumlah Dataset

6382

Provinsi

Terhubung

27 dari **34** → **79%**

Jumlah Dataset

21362

Kab & Kota

Terhubung

166 dari **514** → **32%**

Jumlah Dataset

59816



Peta Jalan Capaian Strategis

Penguatan

Penguatan ekosistem regulasi, pedoman, aparatur, dan kelembagaan

- SDI Kementerian Sektor dan Pemerintah Daerah Provinsi (dan Kab/Kota)*

Implementasi Kode Referensi dan Data Induk proses bisnis umum dalam penyelenggaraan data layanan pemerintah

- Penyusunan **Katalog Data Nasional** disediakan oleh Kementerian Sektor Prioritas dan Pemerintah Daerah Provinsi

- Penyusunan **tata kelola Insentif dan Disinsentif**

- Penyediaan **dashboard Eksekutif Data Prioritas**

2022

Penguatan Ekosistem Data Nasional

Perluasan

Perluasan ekosistem regulasi, pedoman, aparatur, dan kelembagaan SDI Instansi Pusat Lain dan Pemerintah Daerah Kab/Kota*

- **Integrasi data** sistem pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah

- **Tata Kelola Big Data** Pemerintah

- **Interoperabilitas Data Sektor Prioritas** agenda strategis jangka menengah Nasional

2023

Perluasan Interoperabilitas dan Rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis Nasional

Pendayagunaan

Pendayagunaan ekosistem regulasi, pedoman, dan kelembagaan Kolaborasi SDI Badan Hukum Publik dan Badan Usaha Strategis

- Seluruh Data Instansi **sesuai dengan Daftar Data dan Data Prioritas** dapat diakses melalui Portal SDI

- **Pemanfaatan SDI** untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi Pembangunan Jangka Menengah & Panjang
- **Pemanfaatan data yang terkonsolidasi** untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah dalam SPBE

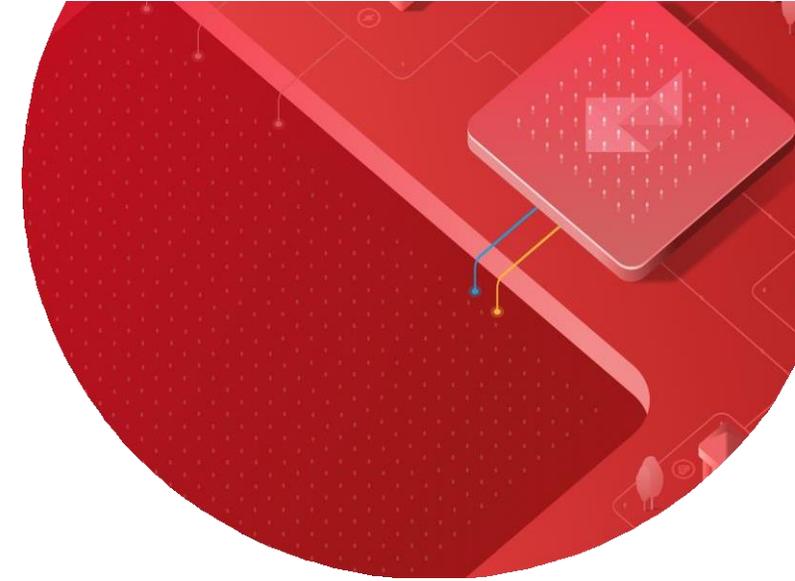
2024

SDI sebagai Tumpuan Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pembangunan

*Percepatan pembentukan regulasi, kelembagaan, dan Forum sampai ke level Kab/Kota sendiri sudah mulai dilaksanakan sejak 2021 Tahun 2023 diharapkan menjadi tahun penyelesaian untuk regulasi, kelembagaan, dan Forum sampai ke level Kab/Kota

3

Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas



Penyepatakan Data Prioritas Pusat 2022

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. /M.PPN/HK/...../20XX
TENTANG
PENETAPAN DATA PRIORITAS TAHUN XX
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Memimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan 30 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Data Prioritas oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - bahwa dalam rangka penetapan Data Prioritas, maka perlu dilaksanakan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat tentang pembahasan dan penetapan Data Prioritas Tahun 2022;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Data Prioritas Tahun 2022;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

Jakarta, 21 Juni 2022
Nomor :

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT
"PENYEPATKAN DATA PRIORITAS TAHUN 2022"**

Bahwa pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Juni, tahun *dua ribu dua puluh dua*, di Hotel Sahid, telah dilaksanakan *Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat* dalam rangka musyawarah dan pengambilan kesepakatan mengenai *Penyepatkan Data Prioritas tahun 2022*;

I. BUTIR-BUTIR KESEPAKATAN

Dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat mengenai *Data Prioritas tahun 2022* ini disepakati beberapa hal sebagai berikut :

No	Butir Kesepakatan	Instansi Terkait
1	Data Prioritas Tahun 2022 • Bahwa Data Prioritas Tahun 2022 ini telah disepakati dan secara utuh memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan/atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP); 2. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs); dan/atau 3. Memenuhi kebutuhan mendesak atau sesuai dengan arahan Presiden. • Penetapan Data Prioritas Tahun 2022 berdasarkan: 1. Usulan Walidata tingkat Pusat; 2. Arahan Dewan Pengarah. • Penetapan Data Prioritas Tahun 2022 dalam pelaksanaannya melibatkan Pembina Data dan Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat, serta difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas.	Seluruh Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
2	Tindak Lanjut Data Prioritas Tahun 2022 • Perencanaan Teknis Pengumpulan Data bersama Produsen Data/Walidata, Pengguna Data dan Pembina Data, meliputi: identifikasi variabel,	Seluruh Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat



data.go.id • Following

data.go.id DATA.GO.ID, JAKARTA - Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamankan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat untuk menyepakati Data Prioritas 2022 dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia (Renaksi SDI) 2022 – 2024, sebagaimana termaktub pada Pasal 16. Langkah percepatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) ini dilaksanakan dengan mengundang Kelompok Kerja (Pokja) Forum SDI dan Walidata seluruh Kementerian dan Lembaga tingkat Pusat pada hari Selasa, 21 Juni 2022 secara hybrid. Penyelenggaraan Forum SDI ini difasilitasi oleh Sekretariat SDI Tingkat Pusat.

Perjalanan Satu Data Indonesia menuju penyepkatan Data Prioritas dan Rencana Aksi dapat ditelusuri sejak tahun 2019 melalui inisiasi regulasi kelembagaan dan tata kerja Dewan Pengarah dan berbagai Forum SDI, hingga hari ini, tanggal 21 Juni 2022. Forum SDI Pusat yang diselenggarakan hari ini berhasil menyepakati Data Prioritas dan Rencana Aksi yang berhasil menghimpun komitmen dari 64 Kementerian/Lembaga. Hal ini disampaikan oleh Oktorialdi, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, selaku Koordinator Sekretariat SDI Pusat.

“Forum SDI hari ini merupakan momen bersejarah. Belum ada terjadi sebelumnya dalam sejarah Republik ini, kita menyepakati Data yang kita anggap prioritas dalam pembangunan dan langkah-langkah pengembangannya melalui Rencana Aksi.” Sebut Oktorialdi

101 likes
7 DAYS AGO

Add a comment... Post

Lampiran Data Prioritas Tahun 2022

Setelah dilakukan FGD dengan Pembina Data yaitu BIG, BPS, dan Kemenkeu diperoleh Total Pre-List Data Prioritas sebanyak **618 data**:

Data Statistik : **526 data/indikator** dari 23 K/L
Data Spasial : **90 IGT** dari 9 K/L
Data Keuangan : **2 data** dari 1 K/L

Penentuan Data Prioritas berdasarkan:

- **Top-down**
Mendefinisikan indikator dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMN/RKP, SDGs, dll) menjadi kebutuhan data serta arahan dari Dewan Pengarah
- **Bottom-Up**
Walidata tingkat pusat dapat melakukan pengusulan data prioritas

Data Statistik untuk dukungan kebijakan:

1. Rencana Kerja Pemerintah (213 Data)
2. SDGs (113 Data)
3. RPJMN (39 Data)
4. UMKM (22 Data)
5. Bansos (16 Data)
6. Perpres 2 Th 2022 (51 Data)
7. Peraturan lainnya (72 Data)

Data Spasial untuk dukungan kebijakan:

1. Rencana Kerja Pemerintah (1 IGT)
2. Perpres 23 Tahun 2021/SK Kepala BIG Nomor 38 Tahun 2021 (69 IGT)
3. UU 31 Tahun 2009 (15 IGT)
4. Perban BNPP No. 3 Tahun 2020 (3 IGT)
5. Perban 5 Tahun 2021 (2 IGT)

Data Keuangan untuk dukungan kebijakan:

RPJMN; Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2021 (2 usulan)

Daftar Data Prioritas Pusat 2022

<http://analitik.data.go.id:8088/r/95>

Filters ←

Tagging / Dasar Rujukan

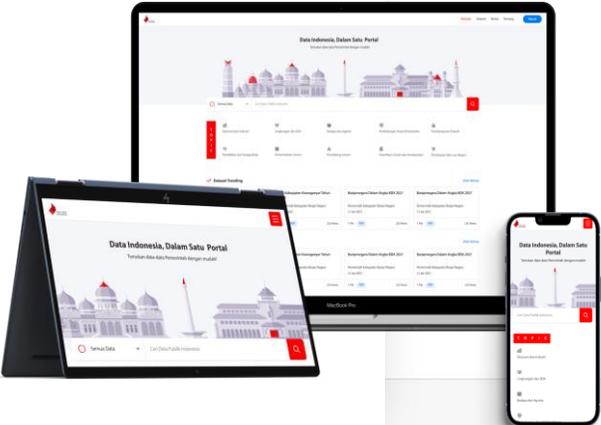
98 options ▾

Jenis Dataset

3 options ▾

Instansi Pusat

26 options ▾



Data Prioritas Tahun 2022

List

Show 200 entries

Nama Data	Instansi Pusat	Produsen Data	Jadwal Rilis Data	Jadwal Pemutakhiran Data	Dasar/Rujukan Prioritas	Jenis Dataset
Persentase keluarga yang berwirausaha	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Direktorat Pelaporan dan Statistik	N/A	Tahunan	Perpres No. 2 Tahun 2022	Statistik
Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Direktorat Pelaporan dan Statistik	N/A	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022	Statistik
Indeks Karakter Remaja	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Direktorat Pelaporan dan Statistik	N/A	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022	Statistik
Indeks Pembangunan Keluarga	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kedepuitan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga	N/A	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022	Statistik
Median Usia Kawin Pertama Perempuan	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kedepuitan Bidang Pengendalian Penduduk	N/A	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022	Statistik
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Direktorat Pelaporan dan Statistik	N/A	Tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022	Statistik
Peta Seismisitas Gempa Bumi skala 1:50.000 - 1:2000	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Deputi Bidang Geofisika	N/A	Bulanan	1. UU No. 31 Tahun 2009; 2. Perpres No. 93 Tahun 2019	Spasial
Peta Seismisitas Gempa Bumi skala 1:50.000 - 1:2000	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Deputi Bidang Geofisika	N/A	Bulanan	1. UU No. 31 Tahun 2009; 2. Perpres No. 93 Tahun 2019	Spasial
Peta Curah Hujan dan Hari Hujan skala 1:50.000	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan	Deputi Bidang Klimatologi	N/A	5 Tahunan	1. UU No. 31 Tahun 2009; 2. Perpres No. 93 Tahun 2019; 3.	Spasial

Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas

Daftar Data dikumpulkan di tahun selanjutnya

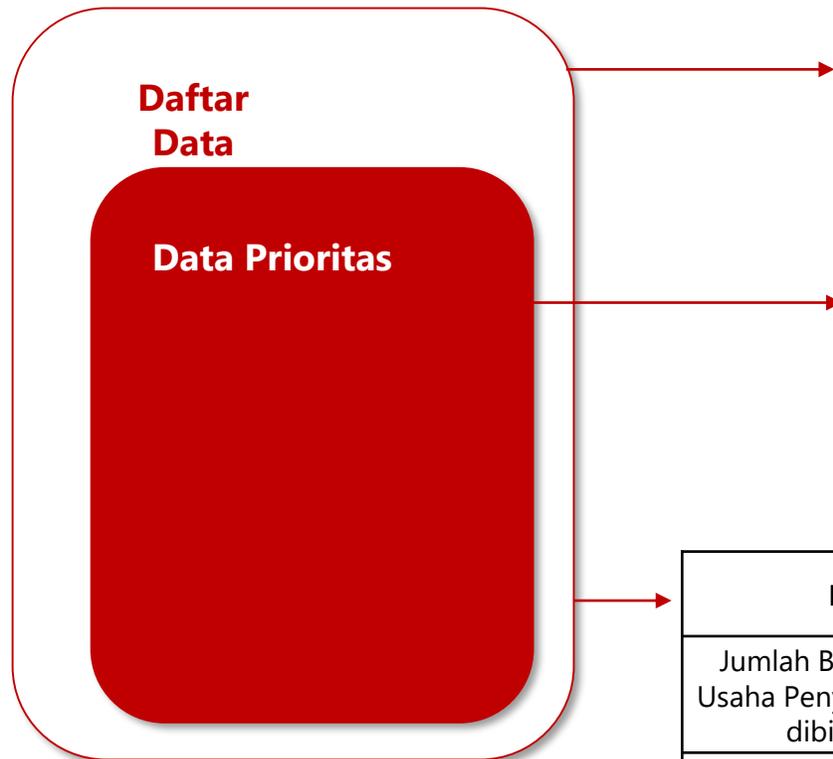
- Memuat : 1. Produsen Data
2. Jadwal Pemutakhiran Data

- Sumber : 1. Arsitektur SPBE
2. Forum SDI
3. Rekomendasi Pembina Data

Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia

- Pengusul : 1. Walidata Tingkat Pusat
2. arahan Dewan Pengarah

- Kriteria : 1. Mendukung RPJMN/RKP
2. Mendukung TPB/SDGs
3. Memenuhi Kebutuhan Mendesak



Nama Data	Instansi	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	Rujukan
Jumlah Badan pada Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas yang dibina dan diawasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<i>Ditjen Migas</i>	<i>Triwulanan</i>	Perpres 2 Tahun 2022
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Deputi Perlindungan Khusus Anak	3-5 tahunan	Rencana Kerja Pemerintah 2022
Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	Tahunan	RPJMN/RKP

Perencanaan Data Indikator Dibentuk Dari Variabel Yang Didata

Secara sederhana, proses Perencanaan Data adalah mengidentifikasi **kebutuhan data (variabel) untuk setiap indikator** (RPJMN, RKP, SDGs, Renja, RPJMD, RKPD, dan lainnya).

Proses ini dapat dilakukan melalui Forum Satu Data (Pusat/Daerah) dengan melibatkan Pembina Data agar terjadi konsistensi penamaan dan pengisian Metadata Variabel.

Daftar Data yang Akan Dikumpulkan kemudian akan menjadi dasar proses pengumpulan data.



Contoh:

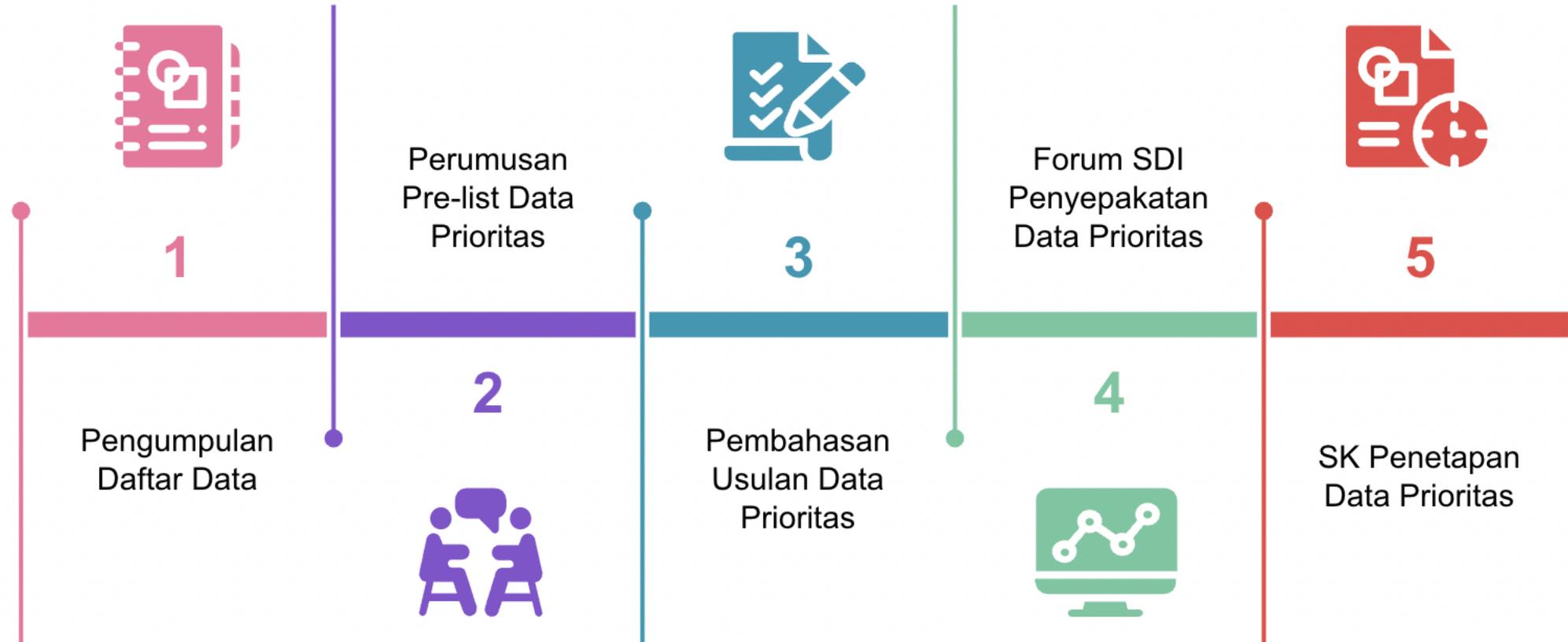
Tabel 5.4 Tujuan dan Sasaran RPIMD Provinsi Jawa Timur

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET						KONDISI AKHIR 2024
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	7,55	7,63	7,71	7,79	7,87	7,95	8,03	8,03
			Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,29	6,34	6,39	6,44	6,49	6,54	6,59	6,59
			Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan & Penggalian	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertambangan & Penggalian	2,38	2,50	2,65	2,80	2,95	3,10	3,25	3,25

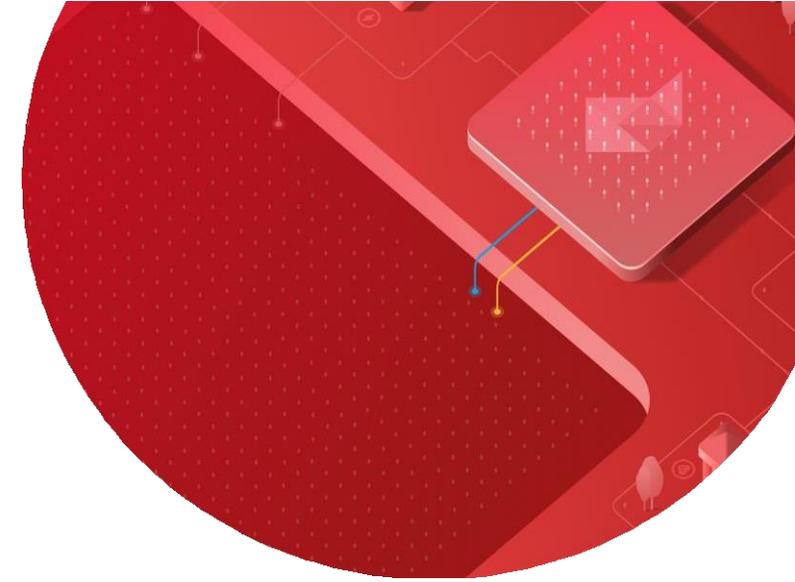
DAFTAR DATA yang akan dikumpulkan minimal memuat atribut:

- Nama Data
- Jadwal Pemutakhiran atau Jadwal Rilis Data
- Produsen Data
- Atribut-atribut lainnya sesuai arahan Pembina Data dan kebutuhan administratif & deskriptif

Kriteria Penetapan Data Prioritas Daerah



4



Poin Kesepakatan Rapat Dewan Pengarah 2022

6 Juli 2022



Rapat Dewan Pengarah: Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia



Arahan Presiden di Rapat Terbatas SDI

Dalam rangka melaksanakan Arahan Presiden pada Rapat Terbatas mengenai percepatan Kementerian/Lembaga/Daerah dalam implementasi kebijakan SDI.



Konsolidasi
Penyelenggaraan
Satu Data
Indonesia



Satu Data
Indonesia
mendukung
Registrasi Sosial
Ekonomi



Enforcement
Implementasi
Kebijakan Satu
Data Indonesia



Monitoring dan
Evaluasi Satu Data
Indonesia



Dukungan Infrastruktur TIK
Nasional: Pusat Data
Nasional (PDN) dan Sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah (SPLP)



Poin Kesepakatan Hasil Rapat Dewan Pengarah 2022



Poin Kesepakatan Hasil Rapat Dewan Pengarah 2022



1 **Penguatan** penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI)



5 **Mendukung Registrasi Sosial Ekonomi** bersinergi dengan Satu Data Indonesia



2 **Penguatan Kolaborasi Implementasi Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** di tingkat Pusat dan Daerah



6 **Peningkatan Peran Kementerian Dalam Negeri** dalam mendukung Penyelenggaraan SDI di Pemerintahan Daerah dan **penetapan NIK sebagai Data Induk (Master Data)** guna pemanfaatan data layanan administrasi pemerintah



3 **Peningkatan Pemanfaatan Infrastruktur TIK Nasional** untuk berbagai pakai data



7 Penyusunan dan Implementasi Strategi Baru untuk **Pemenuhan SDM Talenta Digital** di pemerintahan

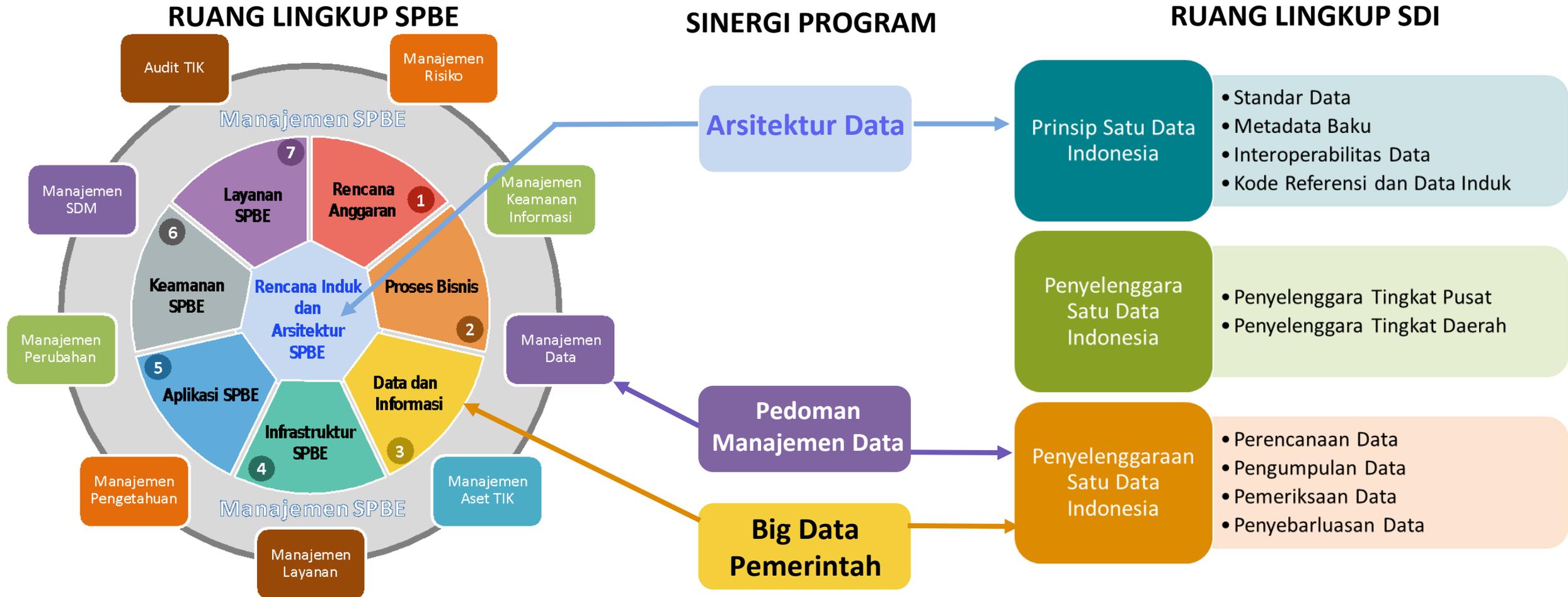


4 **Peningkatan Pemanfaatan Data** untuk Pengambilan Keputusan dan Perumusan Kebijakan



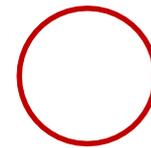
Sinergi SPBE dan SDI

SPBE yang berkualitas mendukung Data yang berkualitas

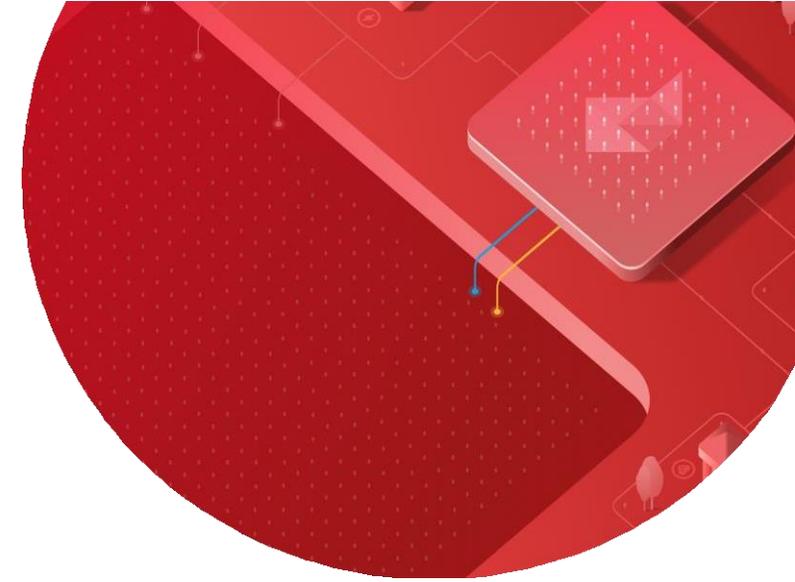


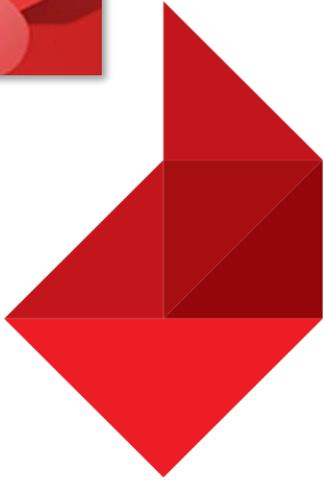
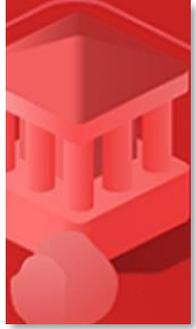
Data yang berkualitas mendukung SPBE yang berkualitas

5



Penutup





SATU DATA INDONESIA

Dukungan Sekretariat Satu Data Indonesia dalam bentuk pendampingan dan penerbitan referensi regulasi Satu Data Indonesia tingkat Pusat maupun Daerah



Pendampingan pelaksanaan Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah



Referensi Pergub/ Perwali / Perbup mengenai Satu Data Indonesia untuk daerah



Pendampingan Forum Satu Data Daerah



Pendampingan Teknis Tata Kelola dan Perencanaan Data di Daerah



Referensi Surat Keputusan tingkat daerah terkait Pembentukan Penyelenggara Satu Data Indonesia



**Grup Koordinasi
SDI-Pemda**



**Kanal Satu Data Indonesia
tingkat Daerah**

wadah komunikasi dan koordinasi
antar penyelenggara Satu Data
Indonesia di tingkat daerah untuk
mendukung percepatan
penyelenggaraan SDI



**Ayo
Gabung!**

**Terima
Kasih**

Salam Satu Data

@data.go.id



@datagoid



www.facebook.com/datagoidofficial

